

**AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN  
PROGRAM KELUARGA HARAPAN MASA PANDEMI  
COVID-19 DI DESA LANDUNGSARI KECAMATAN DAU  
KABUPATEN MALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



**OLEH :  
RIRIN  
NIM: 2018110045**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi  
MALANG  
2022**

# **AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA LANDUNGSARI KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG**

Ririn<sup>1)</sup> Hendrik Suhendri<sup>2)</sup> Risnaningsih<sup>3)</sup>

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana  
Tunggadewi Malang

E-mail: [ririn13mym@gmail.com](mailto:ririn13mym@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Desa Landungsari merupakan kota yang mendapat bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH). Legitimasi penilaian ini adalah untuk menetapkan Akuntabilitas dan Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) selama Pandemi Covid-19 di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Sejak awal Pandemi Covid-19 di planet bumi dan di Indonesia sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, sehingga para ahli tertarik untuk mengetahui bagaimana cara melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) selama Pandemi Covid-19 di Indonesia. Indonesia. Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang telah dilaksanakan. hadiah dan kekuasaan. Objek penelitian ini adalah Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Pemeriksaan semacam ini bersifat pribadi, disampaikan sebagai laporan atau penggambaran. Sumber informasi yang digunakan untuk membantu pemeriksaan ini adalah informasi penting dan informasi tambahan. Sistem pengumpulan informasi yang digunakan oleh para ahli adalah persepsi, pertemuan dan dokumentasi. Tata cara melihat informasi dalam penelitian ini adalah teknik ekspresif. Dari tinjauan tersebut, sangat terlihat bahwa Akuntabilitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) pada masa Pandemi Covid-19, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang masih belum hati-hati dan memiliki tidak dibatasi. , ia cenderung dari pemenuhannya dilihat dari jalannya komitmen, komitmen, komitmen internal, komitmen luar, bagian dari perjuangan, dan hasil. Eksekusi program family trust belum diperpanjang di masa pandemi COVID-19 mengingat belum tercapainya tujuan dari kedua penanda tersebut, terutama right center yang menyatakan ada daerah yang terlibat dan normal. pertemuan-pertemuan dan bantalan berharga yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan PKH adalah gagasan yang tidak jelas yang dicapai dengan kesiapan hibah dari Pemerintah Pusat. target, tanda-tanda kegiatan pembelajaran, tujuan, dan perubahan nyata telah tercapai.

***Kata Kunci : Akuntabilitas, Efektivitas, Program Keluarga Harapan (PKH),  
Pandemi Covid-19***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tingkat pengangguran moneter yang meningkat dapat mengurangi peluang yang diharapkan untuk lebih mengembangkan efektivitas secara lokal, dan sosial mencerminkan peningkatan beban di area lokal dan iklim secara umum. Dengan demikian, daerah setempat secara bertahap akan terdorong menjadi kelompok masyarakat yang kurang beruntung (Mahsunah 2012).

Dunia sedang dilanda Virus Corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah kontaminasi yang terjadi setelah sistem pernapasan. Infeksi yang disebabkan oleh polusi dengan penyakit ini disebut COVID-19. Coronavirus dapat menyebabkan lebih sedikit masalah dengan sistem pernapasan, penyakit paru-paru yang serius, dan bahkan kematian. Menurut situs WHO, Virus Corona adalah kontaminasi berbeda yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, mahkota diketahui menyebabkan dampak pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih sulit seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS). Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, seperti orang tua (orang yang lebih mapan), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Virus corona semakin tinggi setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan pencemaran ini sebagai pandemi dan meminta Presiden Joko Widodo mengumumkan status darurat untuk mahkota publik.

Pada 2 Maret 2020, Indonesia mengumumkan contoh penyakit yang paling berkesan dengan Covid yang menyebabkan Covid-19. Sekitar waktu itu, Presiden

Joko Widodo melaporkan ada kasus 1 dan 2 Covid-19 yaitu seorang lansia berusia 31 tahun dan ibu anaknya. Untuk mencegah penyebaran infeksi COVID-19, otoritas publik telah menetapkan aturan pemisahan fisik (penghapusan sosial), dan Lockdown. Namun, kehadiran pedoman ini mempengaruhi berbagai bidang kehidupan individu seperti pendidikan, ekonomi, miniatur, usaha kecil dan menengah (UMKM) yang secara tiba-tiba menghentikan pergerakan uang. (Suhendri, dkk, 2022).

Suhendri, dkk. al, (2022) mengungkapkan dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. daya beli atau pemanfaatan individu, yang menopang 60% ekonomi publik, mengalami penurunan kritis.. Kondisi ini berimbas pada malasnya gerak dunia usaha, termasuk UMKM. Ketiga, kemerosotan moneter di seluruh dunia telah menyebabkan turunnya biaya barang dan penanguhan produk-produk Indonesia di luar negeri. Pada umumnya, penyebaran COVID 19 telah menyebabkan pola yang melemahkan di seluruh dunia di area modern, penurunan tindakan pertukaran global.

Isu ini menjadi kesulitan utama bagi otoritas publik untuk memikirkan dampak pandemi COVID-19. Dengan cara ini, otoritas publik telah memahami beberapa program panduan, terutama untuk orang miskin, secara langsung atau tidak langsung, untuk mengurangi beban di daerah. Salah satu inisiatif yang mendukung wajib pajak dalam menangani kemiskinan atas bantuan pemerintah daerah yang telah berjalan beberapa waktu sebelum pandemi COVID-19 adalah

Sesuai Manto A, dkk, (2021). Tanggung jawab moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh pemodal untuk menjaga masyarakat umum dari pertimbangan

negatif dan menyampaikan kepada mitra bahwa uang dalam persekutuan adalah tanggung jawab. Karena sudah melalui tahapan pencatatan dan penilaian serta ada tanda dari atas inisiatif bahwa laporan anggaran sudah benar, maka gambaran negatif dari masyarakat pada umumnya bisa dijauhkan. Seperti yang ditunjukkan oleh Risnaningsih, dkk, (2018). “Tugas Pembukuan dalam Laporan Transparansi dan Pertanggungjawaban ikhtisar fiskal”.

Desa Landungsari memunculkan permintaan akan Akuntabilitas yang menjadi sumber data yang signifikan bagi daerah. Mekanisme Tanggung Jawab dan Efektivitas dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan harus diawasi dan diperiksa secara tepat dan akurat untuk menghindari masalah dan mencegah kelainan.

Tanggung jawab Desa Landungsari adalah keterusterangan yang menunjukkan keterpercayaan dan ketepatan. Tanggung jawab akan menunjukkan hasil dari Program Keluarga Harapan yang telah dijalankan. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, wajib bagi instansi pemerintah untuk tidak henti-hentinya menulis tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang telah dilaksanakan untuk mengapresiasi pelaksanaan yang baik dan terlaksananya pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Mengingat gagasan Akuntabilitas, jenis tanggung jawab kepada Tuhan tidak mungkin dalam struktur yang sebenarnya atau yang harus terlihat oleh orang-orang. Menyelesaikan setiap pekerjaan yang dibagikan dengan mengawasi dana dengan hati-hati dan tanggung jawab penuh adalah jenis tanggung jawab moneter yang diselesaikan oleh pemodal. Sementara itu, semua pemodal mengakui bahwa

membuat catatan Transparansi dan Akuntabilitas bergantung pada iman kepada Tuhan, yang dengan demikian memberi energi pada pembentukan tanggung jawab vertikal. (Hermanto dkk, 2021).

Mengingat klarifikasi tentang keanehan yang terjadi selama pandemi COVID-19. Para ilmuwan tertarik untuk mengarahkan kajian terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang disusun dengan judul “**Akuntabilitas Dan Efektifitas Pelaksanaan program Keluarga Harapan Masa Pandemi Covid-19 dengan memilih tempat di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan landasan di atas, perincian masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Landungsari Kecamatan Dau?
2. Shock Efektifnya Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Landungsari Kecamatan Dau?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuannya yaitu:

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Keluarga Harapan pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Landungsari Kecamatan Dau.
2. Untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Landungsari Kecamatan Dau.

#### **1.4 Manfaat penelitian**

Dalam ulasan ini, para analis mengumpulkan dua keuntungan dari ulasan ini, khususnya:

##### **1. Secara hipotetis**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, memberikan pemahaman tentang Akuntabilitas dan Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Landungsari Kecamatan Dau.

##### **2. Pada dasarnya**

###### **a. Untuk Peneliti**

Untuk menumbuhkan informasi, memperluas cakrawala dan menambah referensi yang diterapkan di dunia kerja.

###### **b. Untuk Universitas**

Hasil penelitian ini diyakini dapat dimanfaatkan untuk menambah referensi perpustakaan Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang dan memperluas informasi tentang Akuntabilitas dan Efektivitas.

###### **c. Bagi Pelaksana Program Keluarga Harapan**

Memberikan tambahan data kepada pihak-pihak yang berkomitmen melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) dan sebagai bahan penilaian bagi pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH).

## DAFTAR PUSTAKA

- Anto, H., Suhendri, H., & Iriani, N. (2021). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI KEAGAMAAN PADA GEREJA GPDI GLORIA MALANG. *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 10(1), 21-38. Retrieved from <https://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/4659>
- Abdullah dalam Suyanto, 2014. Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium II. Yogyakarta: Adi Cita. Hlm 151.
- Al, Gibson. Et. 2013. Bungkaes. Jakarta.
- Apriani, Sonia. 2021 . “ Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemic Covid-19 Di Desa Sumber Mulyo Kecamatan Bambang Lipuro Kabupaten Bantul DIY ”. *Skripsi*. Ilmu Pemerintahan. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”. Yogyakarta.
- Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, 2014. *14 kriteria miskin menurut standar BPS*. (Online). Diakses <https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/sosial/pe-rysyaratan-perizinan/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/index.html> pada tanggal 30 juni 2022 pukul 16.36 WIB.
- Haughton, Jonathan dan Shahidur R. Khandker, 2012, Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan(Handbook on Poverty and Inequality), Jakarta: Salemba Empat.
- Inaya, Amira. 2021. Analisis efektivitas program keluarga harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di kelurahan helvetia timur. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Diakses <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/45003/170902079.pdf?sequence=1&isAllowed=y> pada tanggal 15 Januari 2022 pukul 20.38 WIB.
- KBBI. 2022. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Internet. Diakses <https://kbbi.web.id/efektivitas> Pada Tanggal 11 Januari 2022 Pukul 08.35 Wib.
- Kamayanti, A., Sokarina A., Lutfillah, N.Q., Briando, B., Ekasari, K., Suhendri, H., Darmayasa, I.N. (2022) Metodologi Paradigma Nusantara. Cetakan ke I : Februari 2022. Malang, Jatim : Penerbit Peneleh.
- Najidah, Nurul & Hesti. 2019. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang:



EJournal Undip. 8 (2): 4. Journal of Public Policy and Management Review. Diakses di <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/23514> pada tanggal 28 Januari 2022 pukul 11.40 WIB.

Pedoman Pelaksanaan PKH tahun 2020 diunduh melalui website Kementerian Sosial (PKH.kemsos.go.id) pada tanggal 25 Januari 2022, Pukul 16.00

Rahmawati, Fany. Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Moloeng J, Lexy. 2010. *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Remadja Karya

Mahsunah, Durrotul. 2012. “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur”. Surabaya.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset, Yogyakarta. Diakses <http://eprints.iain-surakarta.ac.id> pada tanggal 25 Januari 2022 Pukul 19.00 WIB.

Ridwan, Muhammad Dkk., 2017. *Akuntabilitas Dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil (Analisis Terhadap Karyawan Toko Dikota Buereuneun)*. Vol.2 No.2

Ravianto J. 2014. Produktivitas dan Pengukuran, Jakarta. Binaman Aksara.

Rohmah, Y. A. 2015. *Analisis Akuntabilitas Program Keluarga Harapan. Jurnal Aplikasi Administrasi (Studi Deskriptif Akuntabilitas Administratif Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Kecamatan Semampir Surabaya)*. Vol 18.

Risnarningsih, Sjheny Tanuwijaya, Nur Ida Iriani. 2018. *Improving Transparency and Accountability Of Msme Financial Statements By Using Accrual Method*. Jurnal Manajemen Dan Ekonomi (MEC-J). Vol 2. Diakses <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/mec> Pada Tanggal 21 Februari 2022 Pukul 08.51 WIB.

Suhendri, H., Novitawati, R.A.D. & Iyel, I. (2022). The Impact Of Implementation Of Large-Scale Social Restriction Policies (PSBB) On Income Of Micro Business Before And During The Covid-19 (Study On Micro Business In Indonesia), *European Journal Of Business And Management*, 14 (6): 49 – 53.

Sadono, Sukirno. 2004. Makroekonomi, Teori Pengantar, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sedarmayanti, M.Pd., APU. 2009, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung : Penerbit Mandar Maju.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta

- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan ke-18. Bandung : Alfabeta hal 225
- Sukamadinata.2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tjokroadmudjoyo dalam Dwi Purnama Wati, (2014). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pendidikan Agama Islam Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam. Lampung: Universitas Lampung. Hlm 7. 46.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- Wiestra dalam Febriyanti, 2014. Pelaksanaan Pemberian Izin Oleh Kepolisian. Lampung: Universitas Lampung. Hlm 12.
- Wulandari, F. N. 2020. Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Diakses <http://repository.radenintan.ac.id/12845/> pada tanggal 18 januari 2022 pukul 09.15 WIB.
- Wulandari, Yamardi, & Rohayatin. 2020. Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Selatan. Diakses di <https://scholar.google.com/> pada tanggal 10 Januari 2022 pukul 15.00 WIB.